

# Persaingan Militer Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan dan Pengaruhnya Bagi Indonesia

Syahrul Salam dan Lita Septiana

## *The Abstract*

*The Military competition between the United States and China in the South China Sea giving great implications for Indonesia. The Changes in US foreign policy by applying "rebalancing strategy" in Asia Pacific ( South China Sea ) should be conducted to respond the rising of china ' s military modernization. The Contestacy and military competition between the US and China, especially in the South China Sea brings the influence for Indonesia in the three basic things; political stability in the region, economic growth and readiness of Indonesia in modernize "alutsista". Indonesia can really be productive play a role in easing tension of competition by playing strategy soft power in diplomacy to create mutual trust of the parties.*

## Latar Belakang Permasalahan

Amerika Serikat sebagai negara adikuasa merasa perlu menjaga keamanan internasional. Dalam menjaga kewanaman internasionalnya Amerika Serikat mengajak seluruh negara didunia untuk ikut andil dalam hal tersebut. Amerika Serikat banyak melakukan kerjasama dengan negara aliansinya di seluruh kawasan baik itu dalam bidang militer ataupun kerjasama perdagangan. Namun pada masa pemerintahan Presiden Barrack Obama terdapat pergeseran fokus wilayah yang awalnya lebih fokus ke Timur Tengah, namun saat ini Amerika Serikat lebih fokus ke wilayah Asia Pasifik, termasuk di Laut China Selatan

Hal itu disebabkan karena adanya peningkatan baik itu dari segi ekonomi di Asia Pasifik dan juga peningkatan secara kapabilitas militer negara-negara yang ada di Asia Pasifik. Hal ini menjadikan Amerika Serikat sangat menaruh perhatian penuh di wilayah Asia Pasifik dan semakin diperkuat dengan adanya pernyataan sekretaris negara Hillary Clinton pada pidato East-West Centre di Hawaii yang menyatakan (Clinton, 2014):

"America's future is linked to the future of the Asia Pacific region, and the future of this region depends on America".

Asia Pasifik menjadi perhatian dunia dikarenakan adanya pergeseran politik di Abad ke-21, baik dari segi perkembangan ekonomi maupun militernya. Sehingga kawasan ini mendapat perhatian lebih beberapa tahun

belakangan, khususnya dari Amerika Serikat. Kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan yang sangat penting bagi Amerika Serikat terkait kepentingan ekonomi, militer maupun diplomatiknya.

Disisi lain, Amerika Serikat melihat kawasan tersebut sebagai kawasan yang memiliki banyak potensi konflik, dimana dalam hal ini akan mengancam keamanan di wilayah sekitar. Potensi konflik di beberapa wilayah Asia Pasifik mendorong Amerika Serikat untuk turut andil dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut. Hal ini dipertegas dengan adanya pernyataan Presiden Obama pada November 2011 lalu,

"Asia will largely define whether the century ahead will be marked by conflict or cooperation, needless suffering of human progress."(Obama, 2011)

Dalam menopang militer negaranya Cina juga membutuhkan perekonomian yang baik. Dalam hal ini Cina banyak melakukan kerjasama perdagangan di wilayah Asia khususnya dengan ASEAN sebagai organisasi regional yang sedang memiliki peningkatan ekonomi yang cukup baik. Kebangkitan ekonomi Cina juga memberikan dampak terhadap penambahan anggaran dalam militer Cina guna memajukan militernya menjadi sebuah kekuatan maritime. Pada masa pemerintahan Hu Jintao, militer Cina lebih difokuskan ke laut. Dalam hal ini, Hu Jintao menganggap pentingnya kekuatan laut dalam menjaga wilayahnya dari serangan (Asia Times,

2014). Pada fokus dalam menjadikan negaranya sebagai kekuatan maritime, Cina memilih untuk menekankan penyebaran militernya di Laut Cina Selatan sebagai jangkauan terdekat sebelum merambah ke Asia Pasifik.

Modernisasi militer Cina yang lebih terfokus ke laut juga dipertegas dengan adanya kapabilitas blue water navy sebagai bentuk dominasi kekuatan maritime Cina. Peningkatan kekuatan militer Cina memberikan ketakutan tersendiri terhadap dunia internasional khususnya bagi keamanan regional. Beberapa tahun belakangan Cina telah mampu menyempurnakan kapabilitas green water navy dan menuju kepada kapabilitas blue water navy.

Dalam doktrin green water navy, Cina diharapkan mampu melakukan pengembangan kekuatan angkatan laut Cina yang cukup untuk membangun kontrol atas perairan first chain island. Dengan kesempurnaan dari kapabilitas green water navy, Cina pada saat ini berusaha untuk mengendalikan apa yang disebut sebagai first island chain dari Samudra Pasifik. Daerah ini mencakup Laut Kuning, Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan (Globo Security, 2014). Hal ini sebagaimana ditentukan oleh Laksamana Zhang Xusen, mantan Kepala Staff Komandan Angkatan Laut, konsep first chain island meliputi semua territorials Laut Cina Selatan dan pulau-pulau tersebar perairan ini, termasuk Spratly dan Paracel (Caihong, 1989). Hal ini sejalan dengan konsep bahwa beberapa negara melakukan modernisasi kekuatan militernya dikarenakan adanya beberapa kawasan yang masih menyimpan potensi konflik. Dalam hal ini, Cina sebagai pihak terkait konflik Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur dalam penguasaan doktrin first chain island sebagai bentuk dari kapabilitas green water navy dalam menguasai Asia Pasifik, merasa perlu melakukan modernisasi militer yang terfokus ke laut.

Pentingnya keberadaan Laut Cina Selatan sebagai gerbang selatan pertahanan Cina mendorong Cina untuk melakukan penyebaran militer di wilayah tersebut guna mengamankan wilayahnya dari ancaman serangan musuh. Namun dalam hal penguasaan Laut Cina Timur terkait konflik Senkaku/Diayou, Cina merasa perlu untuk mengamankan wilayah tersebut dikarenakan kepentingan wilayah Cina

yang masih disengketakan. Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur merupakan bagian dari penguasaan first chain island oleh Cina. Maka dalam hal ini Cina menganggap perlunya sebuah fokus terhadap sebuah kekuatan maritime untuk melindungi kepentingannya terutama di wilayah Asia Pasifik.

Selain melakukan modernisasi militer angkatan lautnya, Cina juga melakukan pengembangan militer guna unjuk kekuatan di kawasan. Diantaranya pembangunan pangkalan udara di berbagai lokasi yang memiliki nilai strategi ekonomi dan militer guna menopang kekuatan lautnya. Dalam pengembangannya, salah satu tindakan militer Cina yang paling jelas yaitu dengan dibangunnya Sansha garrison sebagai sebuah kekuatan militer Cina di wilayah baru Sansha City (Mastro, 2014). Namun dengan dibentuknya Sansha garrison, Cina telah membuktikan peningkatan dari diplomasi koersif yang diarahkan kepada para pihak lain yang terkait sengketa.

Pembangunan militer di Sansha memberikan respon yang kuat dari negara-negara di wilayah terkait sikap agresif Cina dalam kegiatan laut terkait sumber daya alam. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengiriman patroli laut dan udara secara intensif oleh Cina ke area yang sudah diduduki oleh negara lain dengan mengirimkan kapal laut untuk mengawal kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan tersebut (Thayer, 2010). Sansha Garrison dibangun Cina dengan tujuan memberikan efek pemaksaan serta penangkalan yang mana ditujukan sebagai power projection yaitu unjuk kekuatan. Pembangunan Sansha Garrison juga memberikan keuntungan tersendiri bagi Cina karena mampu melakukan surveillance dan menempatkan instrumen militernya di wilayah administrasi barunya tersebut. Namun disisi lain, terlihatnya sikap agresif Angkatan Laut Cina menimbulkan sikap provokatif dan dianggap mengganggu stabilitas keamanan negara-negara di sekitar kawasan.

Dalam usahanya menjadi sebuah kekuatan maritime dengan kapabilitas green water navy, Cina juga terindikasi melakukan Anti Access/Area Denial dengan kepemilikan Cina atas pengembangan Armed Anti-Ship Ballistic Missiles atau apa yang disebut dengan SSBN yaitu kemampuan kapal berbasis nuklir

(US Dept. of Defence, 2011). Anti Access/ Area Denial (A2/AD) sendiri merupakan sebuah penutupan akses atau blokade bagi negara lain yang dapat terbentuk melalui kemampuan senjata militer misil balistik dengan jangkauan jarak luas. Daya jangkau misil balistik yang dimiliki Cina tersebut memungkinkan Cina untuk melakukan blokade akses bagi negara lain, khususnya di perairan Laut Cina Selatan.

Menanggapi hal ini, Amerika Serikat melihat bahwa sikap Cina dapat mengancam stabilitas keamanan maupun stabilitas SLOCs (Sea Line of Communication) sebagai jalur pelayaran internasional yang membentang di Asia Pasifik dan menjadi bagian di perairan Laut Cina Selatan. Pengembangan militer Cina yang bersifat eskpansif di wilayah telah mendorong Amerika Serikat untuk melakukan rebalancing strategy di wilayah tersebut. Penyebaran militer Amerika Serikat merupakan bentuk dari kebijakan rebalancing yang dilakukan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Hal ini bertujuan untuk memberikan tekanan kepada Cina sehingga Cina dapat bersikap lebih lunak terhadap dominasi nya di Asia Pasifik. Hal tersebut terlihat dengan bertambahnya penempatan serta kapabilitas militer serta kerjasama militer Amerika Serikat dan negara negara di Asia Pasifik pada tahun 2013 (Brown and Timothy, 2013).

Dari pemaparan di atas, hal yang paling menarik untuk dipertanyakan adalah bagaimanakah implikasi persaingan militer antara AS dan China di laut China Selatan terhadap Indonesia? Pertanyaan ini menjadi penting mengingat posisi dan peran Indonesia di kawasan dan menjadi salah satu the new merging market dan cenderung dikenal lebih memilih pendekatan soft power dalam menyelesaikan persoalan dan sengketa internasional

### **Tinjauan Pustaka. .**

Dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Modernisasi militer Cina terhadap kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik" (Erwinsyah, 2011) mengutarakan bahwa keunggulan Cina dalam aspek ekonomi maupun militer pada saat ini telah membawa Cina pada posisi diplomatik yang semakin kuat. Melalui modernisasi militer yang dilakukannya, Cina memiliki potensi yang semakin besar dalam memberikan pengaruhnya yang akan melahirkan sebuah pergeseran

kekuatan. Sebagaimana yang tercantum dalam kebijakan pertahanan nasionalnya, sasaran utama modernisasi militer Cina dilakukan untuk menyiapkan kekuatan yang cukup dalam menghadapi musuh di kawasan, mempertahankan kredibilitas militernya guna menopang klaim teritorial, melindungi kepentingan nasionalnya, menjaga keamanan dalam negeri serta menangkai setiap tindakan agresi.

Pengembangan kekuatan militer dan modernisasi persenjataan Cina yang terus berkembang dirasakan perlu untuk diantisipasi mengingat potensi konflik yang masih terjadi antara Cina dan para negara tetangganya di wilayah Asia Timur. Modernisasi Cina yang dilakukan dengan peningkatan kemampuan militernya membawa negara negara di kawasan Asia Timur untuk merasakan keberadaan 'power' dalam hubungan politik keamanan di wilayah tersebut. Melihat hal ini, Amerika Serikat sebagai dominasi di kawasan beranggapan bahwa tindakan modernisasi Cina merupakan ancaman pada kekuatan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk mengimbangi militer Cina adalah dengan menghadirkan pasukan militer Amerika Serikat di wilayah Asia Timur dengan dukungan dari beberapa negara di wilayah tersebut.

Amerika Serikat menggunakan strategi enlargement dengan memanfaatkan Jepang dalam menghadapi Cina di kawasan Asia Timur. Meski Cina berulang kali mengingatkan sikap Amerika Serikat yang interfensif, namun dalam sikap interfensifnya Amerika Serikat sangat berhati hati guna menjaga kestabilan keamanan di kawasan tersebut. Hal ini semata mata dilakukan Amerika Serikat karena Amerika Serikat tidak menginginkan perpecahan di Cina daratan yang secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap negara negara di kawasan serta dapat merugikan Amerika Serikat. Meski perebutan kekuasaan antara dua kekuatan tersebut semakin memanas terutama pada bidang militer, namun kedua negara tetap melakukan kerjasama pada bidang perdagangan.

Dalam tulisan yang berjudul "China Factor in U.S.-Vietnam Relations" (Bellacqua, 2012) menjabarkan tentang peran China dalam hubungan Amerika Serikat dan Vietnam.



Peningkatan hubungan kerjasama Vietnam dan Amerika Serikat pada kerjasama keamanan, khususnya dalam tenaga nuklir, penerbangan sipil, militer serta dalam memerangi kejahatan transnasional. Kemajuan hubungan Amerika Serikat - Vietnam ditunjukkan dengan peningkatan hubungan militer - militer dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2010 USS George Washington menjadi kapal induk Amerika Serikat pertama yang mengunjungi Vietnam. Kedua Negara juga melakukan latihan angkatan laut bersama pertama mereka pada tahun 2010, serta melakukan penandatanganan perjanjian baru untuk personil militer Vietnam dalam bidang pendidikan militer profesional pada perguruan tinggi Amerika Serikat. Vietnam disisi lain memiliki beberapa motivasi dalam meningkatkan hubungannya dengan Amerika Serikat. Motivasi Vietnam didasarkan pada kepentingan sektor ekonomi dan keamanan. .

Tulisan ini menjelaskan bahwa Amerika Serikat dan Vietnam memiliki sejumlah alasan untuk menginginkan hubungan yang lebih erat, namun dibalik itu Cina merupakan faktor yang paling penting membentuk hubungan bilateral mereka. Tindakan yang diambil oleh Cina akan terus mempengaruhi kecepatan dan ruang lingkup kerja sama lebih lanjut antara Vietnam dan Amerika Serikat, terutama pada masalah keamanan.

Selain itu, sikap penolakan Cina untuk membahas Laut Cina Selatan dengan masing-masing pengklaim lainnya dalam pengaturan multilateral akan memperkuat tekad Vietnam untuk melibatkan Amerika Serikat sebagai kekuatan eksternal yang memiliki kepentingan bersama di Asia Tenggara. Mengingat sejarah bergolak antara Cina dan Vietnam, retorika agresif dan mengancam perilaku dari Cina kemungkinan akan mengintensifkan ketidakamanan Vietnam dan menyebabkan Vietnam untuk menggunakan Amerika Serikat sebagai payung keamanan.

Permasalahan sengketa dengan negara negara tetangga seperti konflik Laut Cina Selatan dan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik membawa Amerika Serikat untuk melakukan rebalancing terhadap kawasan tersebut. Meningkatnya kapabilitas militer Cina mengancam kemandirian negara negara aliansi

Amerika Serikat seperti Filipina dan Jepang. Hal ini mendorong Amerika Serikat untuk menjalin kerjasama militer dengan negara negara tersebut seperti adanya latihan militer bersama di Filipina. .

### **Kerangka Pemikiran**

#### **• Konsep Rebalancing Strategy**

Istilah rebalancing strategy dinilai lebih cocok dan menekankan elemen kontinuitas dalam strategi pemerintahan saat ini dengan para pendahulunya (Weitz, 2012). Strategi ini adalah soal penekanan prioritas suatu negara yang berusaha mengelaborasi hubungan negara yang sudah ada sebelumnya. Menurut Robert G. Sutter, Michael E. Brown, and Timothy J.A Adamson, with Mike Mochizuki and Deepa Ollapally, menjelaskan bahwa rebalance strategy memiliki tiga bidang, diantaranya keamanan, ekonomi dan diplomasi (Sutter and Brown, 2013).

Konseprebalancing strategy dalam bidang pertahanan merupakan sebuah kebijakan dalam mempertegas kehadiran suatu negara baik itu militer, ekonomi dan diplomasi disuatu kawasan melalui penguatan aliansi maupun perluasan kerjasama keamanan melalui negara negara di kawasan tersebut. Terdapat dua indikator dalam rebalancing strategy pada bidang militer, yaitu adanya penempatan militer baru dan adanya perluasan kerjasama keamanan untuk meraih integrasi militer yang lebih baik.

Rebalancing strategy ke Asia-Pasifik, termasuk di Laut China Selatan ini merupakan strategi politik luar negeri yang diusung oleh pemerintahan Obama. Frase rebalance to Asia ini dimaksudkan untuk menekankan meningkatnya prioritas dari kawasan ini dalam kebijakan global AS. Strategi ini merupakan pendalaman dari upaya pemerintahan Obama, yang dimulai pada tahun 2009, untuk meningkatkan visibilitas diplomatik AS dan kehadiran di Asia-Pasifik. Mungkin yang paling menonjol, sejak 2009, Administrasi Obama secara konsisten memberikan waktu dan penekanan ke Asia Tenggara dan lembaga-lembaga multilateral regional.

Strategi ini pada awalnya lebih dikenal dengan nama Asian Pivot. Namun istilah ini seolah-olah menggambarkan Amerika Serikat melepaskan Asia dan berusaha terlibat kembali

di kawasan tersebut. Pada kenyataannya Amerika Serikat tidak pernah meninggalkan Asia-Pasifik. Istilah pivot lalu ditinggalkan dan diganti dengan istilah rebalancing strategy.

#### • Modernisasi Militer

Dalam teori modernisasi militer yang di tulis oleh Melvin R. Lard and Lawrence J. Korb menjelaskan bahwa:

*Modernisasi militer merupakan upaya kesiapan militer yang difokuskan pada kemampuan negara dalam mengganti setiap persenjataan yang sudah tidak layak pakai atau melakukan peningkatan jumlah persenjataan serta upaya untuk pergantian senjata yang lebih modern dan canggih, (Lard and Lawrence, 2010).*

Dengan kata lain, modernisasi persenjataan militer tidak hanya menekankan pada kuantitas tetapi juga kualitas persenjataan yang siap dalam penggelaran operasi militer di medan tempur dan sesuai dengan karakter yang ada. Modernisasi militer merupakan salah satu upaya dalam mempertahankan keamanan negara serta mencapai suatu kepentingan nasional negara.

Modernisasi militer secara besar-besaran juga mampu membuat suatu persoalan dalam keamanan internasional. Hal ini akan menciptakan suatu spiral aksi reaksi dalam pembangunan persenjataan antar negara (security dilemma), (Jervis, 2012). Militer dan persenjataan memiliki fungsi penting pada suatu negara, seperti deterrence, defense, dan compellence, ketiganya menjelaskan tentang konsep mengapa banyak negara berusaha meningkatkan kekuatan militernya.

- Deterrence adalah memperlihatkan kekuatan militer dari suatu negara sehingga dapat mencegah negara lain (dalam hal ini pihak yang dianggap mengancam) untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian juga dapat disebut sebagai ancaman balasan sebagai hukuman agar pihak lawan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ancaman hukuman tersebut ditujukan pada populasi atau infrastruktur industri sang lawan.
- Defense adalah usaha untuk mengurangi kemampuan pihak lawan untuk

menghancurkan atau menguasai sesuatu dari pihak defender. Konsep defense dengan menggunakan kekuatan militer dilakukan untuk mencapai dua tujuan; berjaga jaga untuk mengantisipasi serangan dari pihak lawan dan meminimalisi kerugian jika diserang. Untuk tujuan bertahan, negara dapat menempatkan pasukan militer tersebut ketika terjadi sebuah serangan, atau melakukan first strike ketika pihak lawan dipercaya akan melakukan serangan.

- Compellence merupakan konsep yang berada pada dua level antara deterrence dan defense. Compellence dengan menggunakan kekuatan militer bertujuan untuk bisa menghentikan pihak musuh ketika telah atau belum melakukan suatu tindakan yang merugikan. Compellence dapat digunakan untuk memaksa fisik atau damai.

#### Pembahasan

Sebagai suatu fakta, sesuai perjanjian dengan pemerintah Irak, AS menarik pasukannya serta peralatan tempurnya dari Irak. Perang di Irak dinyatakan selesai. Keputusan lainnya, Pemerintah Barrack Obama akan menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan pada 2014. Kemana arah penggelaran kekuatan perang AS masa mendatang? AS pada akhir 2011 mulai melihat Kawasan Asia Pasifik sebagai daerah penting yang harus dijaga dan dipertahankan. Menindak lanjuti kebijakannya, AS akan men-deploy sekitar 2500 marinir dengan dislokasi di Darwin (Northern Australia).

Alasan utamanya, karena perkembangan gerakan China yang mencoba melebarkan pengaruh di kawasan Laut China Selatan dengan melakukan klaim kawasan kepulauan Spratly. Kawasan yang diduga mengandung deposit minyak dan gas demikian besar. Beberapa negara yang juga membuat pengakuan atas Spratly menjadi tidak berdaya karena penggelaran kekuatan serta kemampuan Angkatan Perang China di kawasan tersebut jauh diatas mereka. Dua negara yang terus diancam dan ditekan China, yaitu Vietnam dan Filipina. Bahkan Filipina yang akan menambang minyak hanya 50 mil dari perbatasannya dilarang.

Amerika melihat bahwa ancaman China

bukan hanya merupakan masalah spratly belaka, ada yang jauh lebih berbahaya dan cenderung akan mengganggu dan mengancam AS dimasa mendatang. Laksamana RobertF Willard, Komandan Komando Pasifik AS, menjelaskan bahwa nilai jalur laut kawasan Laut China Selatan untuk perdagangan bilateral tahunan bernilai US\$ 5,3 triliun, di mana US\$ 1,2 triliun terkait dengan AS. Sebagai negara super power AS jelas tidak ingin merasa terganggu dan terancam.

China, mengajukan keberatan dengan penggelaran marinir AS di Darwin nampaknya merasa bahwa dia sedang terkepung secara perlahan oleh AS. Kekuatan pemukul AS sudah sejak lama ditempatkan di Korea Selatan dan Jepang. Disamping itu kini Jepang telah memutuskan membeli 42 buah F-35 Lightning-II, Joint Strike Fighter, pesawat tempur siluman, multi role aircraft. Dengan kemampuannya, F-35 akan mampu menyusup dan menghancurkan sasaran di daratan China bahkan Rusia sekalipun. AS dan Jepang melakukan standarisasi pesawat tempur canggih tersebut, untuk menghadapi Rusia dan khususnya China yang sudah memiliki pesawat tempur siluman Chengdu J-20.

### **Implikasi Bagi Indonesia**

Perlu dicatat bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan 10 negara, baik batas wilayah darat maupun wilayah laut. Salah satunya wilayah perbatasan adalah Pulau Natuna yang terletak/berbatasan dengan negara tetangga di Laut China Selatan (LCS) yang merupakan salah satu wilayah perairan di dunia yang diliputi permasalahan paling rumit.

Mencermati aspek historis serta kandungan sumberdaya alam di Laut China Selatan yang sangat berlimpah telah membuat beberapa negara berupaya memasukkan area ini sebagai bagian dari wilayah atau yuridiksinya. Keterlibatan beberapa negara anggota ASEAN sebagai claimant dalam konflik LCS, serta lokasi geografis LCS yang tidak jauh dari perairan Indonesia sudah selayaknya membuat LCS menjadi salah satu perhatian pemerintah Indonesia, khususnya terkait kajian kebijakan diplomasi, kewilayahan dan geopolitik. Merujuk pada kondisi tersebut, perlu adanya

kesamaan pemahaman dan pandangan dari para pemangku kepentingan di Pemerintah Indonesia terkait dampak konflik kewilayahan di LCS bagi Indonesia, terutama di wilayah Pulau Natuna dan sekitarnya. Pulau Natuna dengan luas daratan 2.631 km<sup>2</sup>, di utara berbatasan dengan perairan Vietnam, dan wilayah timurnya berbatasan dengan Malaysia Timur, Kalimantan Barat dan Brunei Darussalam. Sementara itu, di barat Pulau Natuna dengan luas lautan 262.156 km<sup>2</sup> berbatasan dengan Semenanjung Malaysia Barat.

Peta pokok persaoalan di laut China Selatan muncul karena ketidakjelasan kepemilikan pulau dan wilayah laut di Laut China Selatan. Untuk Indonesia sekarang menjadi masalah besar yang dapat mengganggu stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara dan bahkan Asia Timur. China telah menerbitkan Peta Claim China atas wilayah Laut China Selatan. Pada Peta Claim China tersebut tidak ada datum, koordinat, baseline dan lain-lain, dari segi yurisprudensi Claim China tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Indonesia menolak garis batas Claim China yang tanpa dasar hukum laut Internasional,

University of British Columbia dan Pew Environment Group melaporkan bahwa Hampir sepertiga minyak mentah dunia dan lebih dari setengah pasokan LPG dunia melewati laut tersebut—yang sebagian besar mengarah ke Cina dan Asia timur laut. Angkatan Laut AS secara berkala mengerahkan kapal ke perairan itu dan terus berjaga di sekitar Selat Malaka, yakni di dekat Singapura.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa ada beberapa pengaruh yang sangat besar bagi Indonesia jika konflik laut China Selatan tidak segera diredakan. Pertama, stabilitas politik kawasan. Harus diakui bahwa peran Indonesia selama ini relative produktif dalam meredakan konflik kawasan. Ditunjuknya Indonesia sebagai mediator dalam meredakan dinamika politik domestic Myanmar menjadi bukti kepercayaan internasional kepada Indonesia yang cenderung menyelesaikan masalah dan konflik dengan pendekatan soft power.

Dua negara diantara penentu stabilitas kawasan seperti AS dan China mesti dirangkul oleh Indonesia dalam kerangka penciptaan stabilitas kawasan. Indonesia diyakini memiliki



keunggulan dalam konteks penemuan solusi tanpa konflik. Pergola kawasan berarti ancaman serius bagi Indonesia.

Poin yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Harus diakui saat ini Indonesia menjadi bagian dari the new emerging market dan menjadi bagian dari G20. Salah satu syarat pertumbuhan adalah stabilitas politik dan keamanan. Di ASEAN, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang dianggap paling stabil pasca krisis ekonomi global 2008. Pertumbuhan rata-rata ekonomi Indonesia 6,5 % pertahun menjadi bukti bahwa kondusifitas Indonesia memicu pergerakan ekonomi yang positif. Dengan ini, hanya China, India dan Indonesia yang dianggap lebih produktif, lebih terbuka dalam ekonomi kawasan bahkan global.

Munculnya sengketa di Laut China Selatan, tentu akan memicu distabilitas kawasan yang secara langsung akan mengancam pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya yang ketiga, kontestasi militer di Laut China Selatan juga memaksa Indonesia untuk melakukan hal yang sama, yakni terus berusaha melakukan modernisasi peralatan militer. Terlebih jika melihat postur pertahanan kita hingga 2024, Indonesia akan terus melakukan modernisasi peralatan militer. Walaupun cara pandang Indonesia selama ini, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, akan tetapi persiapan internal secara militer terus ditingkatkan. Ini tentu saja menjawab doktrin pertahanan kita yang secara relative berupaya pada titik lokus "defence strategy", bukan "Attack strategy"

### Kesimpulan

Konflik di Laut China Selatan yang secara terbuka melibatkan China dan Amerika Serikat, memberikan pengaruh kepada negara yang ada di sekitarnya, termasuk Indonesia. Setidaknya ada tiga implikasi besar bagi Indonesia terkait dengan konflik di laut China Selatan yakni secara politik, ekonomi dan militer.

Untuk meredakan ketegangan dan tensi konflik di LCS, maka menjadi penting bagi Indonesia untuk mendorong dialog konstruktif para pihak serta berupaya membangun "mutual trust", rasa saling percaya yang saling menguntungkan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Adamson J.A Timothy, Brown E. Michael, Ollapally Deepa, Mochizuki M. Mike, Sutter G.
- Robert, and Timothy J. A. Adamson, with Mike M. Mochizuki, August 2013. *Balancing Acts : The U.S Rebalance and Asia Pacific Stability*, International Affairs, The George Washington University.
- Art J. Robert J. Art and Jervis Robert, *International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues*.
- Booth Ken, Jervis Robert, and Wheeler J. Nicholas, *The security dilemma: Fear, Cooperation, and Trust in World Politics*. New York: Palgrave.
- Boyd Gavin, Rosenau N. James, Thompson W. Kenneth. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press.
- Bush W. George, Fukuyama Frances, Huntington, P Samuel, Kaplan D. Robert, Rodrik Dani, Zakaria Fareed, 2005. *Amerika di Dunia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Keohane, Joseph S. Ny, dan Robert O. 1997. *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Boston: Little Brown Company.
- Papp S. Daniel, 1988, "Contemporary International Relation": *A Framework For Understanding*, Second Editions. New York: MacMillan Publishing Company.
- U.S. Office of Naval Intelligence, 2009. *The People's Liberation Army: A Modern Navy with Chinese Characteristics*. Suitland, MD.
- #### Jurnal
- Baker Carl & Glosserman Brad, 2010. "A Quarterly E-Journal on East Asian Bilateral Relations", *Pacific Forum CSIS*, 3rd Quarterly (July-September) 2010, Vol. 12, No. 3, <http://csis.org/program/comparative-connections>
- Bellaqua James, 2012. "China Factor in U.S-Vietnam Relations", *CNA China Studies*.
- Caihong Huang, 1989. "The PLA Navy's Development Strategy", *Jianchuan Zhishi*, No. 4.
- Carter Ashton, 2013. "The US Defense Rebalance to Asia", *Speech at the Center for Strategic and International Studies*, Washington, D.C.
- Erickson Andrew, 2012. "China's Modernisation of Its Naval and Air Power Capabilities", in Ashley J. Tellis and Travis Tanner, eds., *Strategic Asia 2012-2013: China's Military Challenge*, Seattle, WA. Washington DC: The National Bureau of Asia Research.
- Erwinsyah Aldrin, 2011. "Pengaruh Modernisasi Militer Cina terhadap kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik", *Universitas Indonesia*.

- Hartnett Daniel and Vellucci Frederic, 2011. "Toward a Maritime Security Strategy: An Analysis of Chinese Views Since the Early 1990s," Washington, DC: National Defense University Press.
- Ji You, 2002. "The Evolution of China's Maritime Combat Doctrines and Models", Vol. 22, Institute of Defence and Strategic Studies.
- Jingguang Xiao, 1988. "Memoirs of Xiao Jingguang, Beijing: The PLA Publishing House".
- Korb J. Lawrence and Lard R. Melvin, 1980. "The Problem of Military Readiness", American Enterprise Institute for Public Policy Research.
- Mastro Skylar Oriana, 2012. "The Sansha Garrison: China's Deliberate Escalation in the South China Sea", East and South China Sea Bulletin 5.
- Rowan P. Joshua, 2005. "UNCLOS and Sovereignty Claims in the South China Sea", Asian Survey, Vol. XLV, No. 3.
- Swilande de Struye Tanguy, 2012. "The Reassertion of the United States in the Asia-Pacific Region".
- Taylor Claire And Youngs Tim, 2008. "China's Military Posture", International Affairs And Defence Section, House Of Commons Library.
- Thayer A. Carlyle, 2010. "The United States and Chinese Assertiveness in the South China Sea", Security Challenges, Vol. 6, No. 2.
- Thayer A. Carlyle, 2012. "China's Naval Modernization and US Rebalancing: Implications for Stability in South China Sea", 4th International Workshop on the South China Sea.
- Dokumen Resmi  
A 21st Century Security Partnership, 2012. "2012 Joint Vision Statement for the Thai-U.S. Defense Alliance", <http://www.defense.gov/releases/release.aspx?releaseid=15685>.
- "China's National Defense White Paper 2010", [http://www.china.org.cn/government/whitepaper/node\\_7114675.htm](http://www.china.org.cn/government/whitepaper/node_7114675.htm).
- Congressional Research Service, 2011. "China's Defense White Paper". [www.crs.gov](http://www.crs.gov).
- Congressional Research Service, 2012. "Pivot to the Pacific? The Obama Administration's 'Rebalancing' Toward Asia,".
- The People's Republic of China, 2013. "Information Office of the State Council, 'The diversified employment of China's armed forces'". [http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-04/16/c\\_132312681.htm](http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-04/16/c_132312681.htm).
- The People's Republic of China, 2013. "The Diversified Employment of China's Armed Forces".
- The U.S. Department of Defense, 2012. "Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense,"
- United States, 2010. National Security Strategy, [http://nssarchive.us/?page\\_id=8](http://nssarchive.us/?page_id=8).
- US Department of Defense, 2011. "Annual Report to Congress, Military and Security Developments Involving the People's Republic of China".
- US Department of Defense, 2013. "Annual Report to Congress, Military and Security Developments Involving the People's Republic of China".
- US Department of Defense, 2012. "Secretary of Defense Speech: Shangri-La Security Dialogue".
- White House Government, 2011. "Fact Sheet: The Fiscal Year 2014 Federal Budget and the Asia-Pacific".
- Website  
Antara News, 2009. "AS Tandatangani TAC ASEAN", <http://www.antaranews.com/berita/148417/as-tandatangani-tac-asean>.
- Asia Times Online, 2007. "Greater China" <http://www.atimes.com/atimes/China/IA10Ad01.html>
- Bangkok Post, October 2010. "Vietnam to reopen Cam Ranh Bay to foreign fleets: PM", <http://www.bangkokpost.com/news/asia/204055/vietnam-to-reopen-cam-ranh-bay-to-foreign-fleets-pm>
- BBC United Kingdom, "China Says it Will Boost Its Defence Budget in 2011". <http://www.bbc.co.uk/news/business-12631357>.
- China Daily, 2009. "Navy chief lists key objectives", [http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2009-04/16/content\\_7681478.htm](http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2009-04/16/content_7681478.htm)
- Clinton Hillary, 2010. "America's Future Linked to Future of Asia Pacific Region", <http://www.eastwestcenter.org/news-center/east-west-wire/clinton-americas-future-linked-to-future-of-asia-pacific-region>
- EENI Business School, "Amerika Serikat Ekonomi ekspor Barang dan Jasa", <http://id.reingex.com/United-States-Economy-Exports-FDI.shtml>
- Weitz Richard, 2012, "Pivot Out, Rebalance In", <http://thediplomat.com/2012/05/pivot-out-rebalance-in/>
- Xinhua, 2012. "Chinese Military May Establish Presence In Sansha: Defense Spokesperson," [http://eng.mod.gov.cn/Press/2012-06/29/content\\_4381230.htm](http://eng.mod.gov.cn/Press/2012-06/29/content_4381230.htm).